

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, masyarakat sangat membutuhkan sarana transportasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan alat transportasi dianggap sangat bermanfaat dan efektif pada saat ini. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan akan sepeda motor. Kebutuhan masyarakat akan sepeda motor dalam kenyataannya tidak didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat yang masih lemah serta harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik akhir-akhir ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak, juga berpengaruh pada ongkos pengguna sarana transportasi umum yang semakin mahal. Oleh karena biaya penggunaan sarana transportasi umum yang mahal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kebutuhan alat transportasi.

Sehingga untuk mencapai keinginan ini, maka diperlukan suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan. Kegiatan usaha dibidang pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun pengertian lembaga keuangan bank adalah lembaga khusus yang berusaha dibidang keuangan dan telah mendapatkan izin dari bank sentral untuk menjadi lembaga perantara bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, untuk memperoleh dana pinjaman dari bank dan surat berharga dari lembaga bukan bank sangat sulit diperoleh oleh masyarakat ekonomi lemah. Meskipun tujuan sebenarnya dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya keadaan seperti ini, banyak pengusaha yang melihat peluang ini dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kesempatan yang ada ini, tidak disia-siakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usaha yang sangat menjanjikan ini. Pengusaha mengembangkan bisnis ini, berdasarkan jaminan fidusia yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia melalui pembiayaan konsumen. Dengan adanya sistem pembiayaan konsumen ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kemampuan daya belinya rendah dan tidak mungkin melakukan peminjaman kepada bank, karena belum memiliki kecukupan modal untuk dijadikan sebagai jaminan di bank. Jaminan yang diperlukan dalam pembiayaan konsumen tidak terlalu sulit dipenuhi oleh masyarakat, sebab yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah hak milik atas benda tersebut. Hal ini dilakukan oleh konsumen yang tidak bisa membeli barang secara tunai.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, diatur pengertian lembaga pembiayaan adalah "badan usaha yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan ~~dana~~ atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Sedangkan pengertian pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Menurut Pasal 1319 KUH.Perdata diatur bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau tidak diatur dalam KUH.Perdata, namun tetap tunduk pada KUH.Perdata.

Berdasarkan pengertian perjanjian pembiayaan konsumen ini sehingga diperlukan suatu bentuk lembaga jaminan yang dapat memberikan dan menjamin kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan atas piutang. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang tepat dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah fidusia. Adapun pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 diatur tentang jaminan fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pemilik benda”. Pengusaha melakukan penyerahan kepemilikan benda secara yuridis berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain fidusia dapat disebut *Constitutum Possessorium*,

yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda tersebut sama sekali.

Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dimintakan jaminan fidusia atas benda tersebut, berdasarkan pada Pasal 1131 KUH.Perdata yang diatur bahwa "seluruh kebendaan si berutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Hal ini sesuai dengan pengertian jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 adalah "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan".

Adanya keharusan penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia ini, dilakukan agar pengusaha mendapatkan hak preferen yang memberikan suatu kedudukan yang lebih baik dari para kreditur lainnya atas pelunasan hutang debitur. Pelunasan hutang debitur ini merupakan hak yang diutamakan yang dimiliki kreditur, apabila akta jaminan fidusia didaftarkan. Sehingga agar penerima fidusia mendapatkan hak preferennya, maka objek jaminan fidusia tersebut harus terlebih dahulu dibuatkan akta otentik dari notaris yang merupakan akta jaminan fidusia agar dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan pendaftaran akta jaminan fidusia ini, maka penerima fiduisa akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia

digunakan apabila debitur melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, maka objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan 3 cara, yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Adapun pengertian akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. Kegunaan dari akta otentik dalam pengadilan adalah memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, maka objek jaminan fidusia dapat dieksekusi atas kekuasaan kreditur sendiri melalui juru sita pengadilan. Dari sisi pengusaha dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan rasa aman, kepastian hukum dan memperoleh perlindungan secara hukum atas pelunasan hutang debitur.

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka kreditur tidak mempunyai hak preferen atau hak yang diutamakan atas pelunasan hutang debitur. Dengan kata lain, kedudukan kreditur tidak lagi memiliki hak yang diutamakan, melainkan hanya memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya, yang artinya bahwa kedudukan kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur harus bersaing dengan kreditur lainnya. Sehingga dalam hal pelunasan hutang debitur kepada kreditur konkuren ini tidak terlindungi secara penuh oleh hukum, karena akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ini tidak dapat dikatakan sebagai jaminan fidusia, namun masuk dalam lingkup

jaminan umum. Sebab adanya keharusan menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.

Oleh karena itu, apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak dapat melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu dalam hal pelunasan hutang debitur dan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebab penerima fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan atau kedudukan yang diutamakan dalam memperoleh pelunasan hutang debitur dan penerima fidusia tidak dapat meminta kepada pengadilan setempat untuk menahan (hak retensi) dan mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui juru sita pengadilan. Adapun pengertian hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur untuk menahan benda debitur, sampai hutang kreditur dilunasi oleh debitur.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana UU No. 42 Tahun 1999 itu kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, diatur bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia” dan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, diatur bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Dalam UU Jaminan Fidusia ini juga diatur mengenai biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa "terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ini, ditindak lanjuti dengan Pasal 12 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yang mengatur "untuk pertama kali, kantor pendaftaran jaminan fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia" dan dalam Pasal 12 (4) UU No. 42 Tahun 1999, mengatur "ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden".

Adapun ketentuan mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia untuk nilai jaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dikenakan

biaya sebesar Rp.25.000,00 per akta.dan untuk nilai jaminan diatas Rp. 50.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 per akta

Dalam prakteknya akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta dibawah tangan, bukan dalam akta notaris. Pengertian akta dibawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat para pihak, dimana pembuatannya tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta yang sah dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Akta dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dalam akta dibawah tangan harus dibuat dalam akta otentik terlebih dahulu oleh penerima fidusia agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam prakteknya banyak lembaga pembiayaan, khususnya mengenai sepeda motor hanya mencantumkan kata-kata “dijaminkan secara fidusia”. Namun tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta otentik dari notaris serta tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini didasari oleh prinsip dasar ekonomi yang lebih mengutamakan pengeluaran biaya produksi yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha tidak mau mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta notaris dan biaya pendaftaran jaminan fidusia yang akan mengurangi keuntungan atau laba pengusaha. Hal ini sangat memberatkan bagi pengusaha, karena akan mengeluarkan biaya setidaknya sebesar Rp. 50.000,00 ditambah dengan Rp.

25.000,00 untuk biaya pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia yang nilai penjaminan dibawah Rp.50.000.000,00.

Hal mengenai biaya ini belum ditambah dengan lamanya waktu untuk mengurus pembuatan akta jaminan fidusia di notaris dan pendaftaran akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dalam kegiatan bisnis kecepatan waktu dan pelayanan yang baik terhadap konsumen memiliki peranan penting bagi kelangsungan sebuah tempat usaha. Kecepatan waktu dalam suatu transaksi sangat berpengaruh pada perputaran uang serta keuntungan yang akan diperoleh pengusaha. Sedangkan pelayanan kepada konsumen yang baik dan memuaskan secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan laba perusahaan. Sehingga lembaga pembiayaan menganggap bahwa UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini sangat memberatkan bagi pengusaha, karena dianggap kurang bernilai atau penting apabila dilihat dari isi ketentuannya, sebab kurang memberikan kepastian hukum.

Namun apabila debitur melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati kepada kreditur selama tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak kreditur akan mengambil atau menarik objek jaminan fidusia, tanpa melalui juru sita pengadilan, sebab penerima fidusia tidak membuat akta notaris dan tidak dapat mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Biasanya lembaga pembiayaan memiliki suatu tim khusus atau *developer* untuk menggunakan hak retensi dan melakukan eksekusi terhadap benda yang

dijaminkan secara fidusia tersebut. Tim khusus ini dikenal dengan nama *remedial*, *rof coll* atau *remove*. Apabila eksekusi melalui tim khusus gagal, biasanya lembaga pembiayaan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan eksekusi.

Ketidakselarasan dalam pendaftaran jaminan fidusia ini memberi dampak bagi perlindungan hak pada pihak pengusaha dan konsumen. Sehingga menimbulkan banyak resiko yang akan dihadapi oleh pengusaha dan konsumen jika pendaftaran tidak dilakukan dengan benar.

Melihat pentingnya pemberitahuan dan pemahaman akan pendaftaran jaminan fidusia ini, bagi pihak pengusaha dan masyarakat, maka perlu ditindak lanjuti mengapa dalam praktek pembiayaan konsumen, banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Meskipun telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan ini penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“KEBERLAKUAN EVALUATIF PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 42 TAHUN 1999”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bagaimana keberlakuan evaluatif pendaftaran jaminan fidusia mengenai biaya-biaya pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami keberlakuan evaluatif pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia,

1. bagi peneliti : menambah wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan keberlakuan evaluatif pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.
2. bagi masyarakat : menambah wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.
3. bagi pemerintah : agar dapat menjadi bahan referensi dan perbaikan peraturan hukum, khususnya berhubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang berkaitan dengan keberlakuan evaluatif pendaftaran jaminan belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan, diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Yoshepin. L yang berjudul “Perjanjian Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen” (studi kasus di PT. Armada Finance cabang magelang), serta skripsi yang disusun oleh Agung Supriyadi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Beli Sewa dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Kendaraan Bermotor” (studi kasus di PT. Asli Motor dan Oto Finance). Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Yoshepin L bertujuan untuk mengetahui upaya hukum kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek perjanjian sebelum perjanjian berakhir. Sedangkan penelitian Agung Supriyadi menitikberatkan pada praktek jual beli kendaraan bermotor yang dikonstruksikan sebagai perjanjian beli sewa dan perjanjian pembiayaan konsumen.

F. Batasan Konsep

Adapun pengertian-pengertian yang terkandung atau dimaksud dalam judul skripsi ini adalah :

1. Keberlakuan evaluatif adalah suatu keberlakuan kaidah hukum yang memiliki suatu sifat mewajibkan oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya yang dipandang bernilai atau penting.
2. Pendaftaran fidusia adalah suatu upaya untuk memenuhi asas publisitas guna mendapatkan kepastian hukum bagi kreditur.
3. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, berupa bahan buku baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma-norma hukum positif

yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia.
- 7) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

- 8) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku yang berhubungan dengan masalah pendaftaran jaminan fidusia, artikel, laporan penelitian, *web-site*, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga Bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup disertai lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan ini, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, kerangka penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam Bab ini, akan membahas yang pertama adalah mengenai tinjauan umum tentang hukum jaminan yang terdiri dari pengertian, fungsi dan jenis-jenis jaminan. Kedua tinjauan khusus mengenai jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, objek fidusia, sifat jaminan fidusia, prinsip jaminan fidusia, pembebanan fidusia, pendaftaran fidusia, biaya pendaftaran fidusia, kantor pendaftaran fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan hapusnya fidusia. Ketiga analisis mengenai pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia yang terdiri dari pengertian fidusia dan jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia,

biaya pendaftaran fidusia, akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia, kantor pendaftaran jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III. PENUTUP

Dalam Bab ini, berisi mengenai kesimpulan, saran-saran sebagai pelengkap dan daftar pustaka.

